

Notulensi Tanya Jawab Kelompok 1

1. Suci Tri Wahyuni _2313031012

Pertanyaan : Menurut kalian, apakah sistem akuntansi sektor publik di Indonesia sudah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi? Berikan alasannya dan contoh nyata!

Jawaban: Iya, sistem akuntansi sektor publik di Indonesia sudah mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, terlihat dari laporan keuangan pemerintah (LKPP/LKPD) yang diaudit BPK dan bisa diakses publik, misalnya lewat portal APBN Kita atau SIPD. Namun, penerapannya belum merata karena masih ada temuan BPK terkait aset/anggaran serta daerah yang kurang terbuka dalam publikasi laporan.

2. Najwa Ayudia_2313031027

Pertanyaan: Bagaimana tuntutan sosial dan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi karakteristik dan lingkungan sektor publik?

Jawaban: Tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara langsung mempengaruhi sektor publik dengan mendorong pemerintah untuk: memprioritaskan layanan publik yang relevan, menyesuaikan kebijakan dan regulasi, mengembangkan struktur organisasi yang adaptif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi harapan warga. Perubahan kebutuhan masyarakat, seperti tuntutan akan pendidikan, kesehatan, atau keamanan yang lebih baik, memaksa sektor publik untuk berinovasi, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan membentuk lingkungan kerja yang responsif terhadap warga.

Dampak pada Karakteristik Sektor Publik:

1. Prioritas dan Fokus Layanan:

Jika masyarakat menuntut lebih banyak layanan kesehatan, sektor publik akan fokus pada pengembangan infrastruktur dan SDM kesehatan. Kebutuhan akan pendidikan berkualitas tinggi juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.

2. Perubahan Kebijakan dan Regulasi:

Tuntutan sosial dapat memicu lahirnya undang-undang baru, peraturan, atau perubahan kebijakan yang mengatur layanan publik agar lebih adil, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Adaptasi Struktur dan Organisasi:

Sektor publik mungkin perlu mengubah struktur birokratisnya yang kaku menjadi lebih fleksibel dan responsif untuk melayani masyarakat secara efektif.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

Masyarakat semakin menuntut agar penggunaan dana publik dilakukan secara transparan dan akuntabel, memaksa sektor publik untuk lebih terbuka terhadap publik dan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

3. Sela Ayu Irawati 2313031015

Pertanyaan: Jika sebuah pemerintah daerah ingin menerapkan sistem e-budgeting untuk meningkatkan transparansi, bagaimana faktor-faktor lingkungan ini (selain teknologi) dapat menjadi hambatan atau justru pendorong keberhasilan inisiatif tersebut?

Jawaban: Keberhasilan e-budgeting dipengaruhi banyak faktor selain teknologi. Dukungan politik, ekonomi yang cukup, aturan yang jelas, SDM yang siap, serta masyarakat yang peduli bisa menjadi pendorong. Sebaliknya, konflik kepentingan, keterbatasan anggaran, regulasi yang tumpang tindih, aparatur yang kurang terampil, dan rendahnya partisipasi publik bisa menjadi hambatan.

Notulensi Studi Kasus Kelompok 1

Menanggapi studi kasus no 1 (khoirun nisa_2313031005)

1. Berdasarkan pengertian dan karakteristik sektor publik, jelaskan mengapa Pemerintah Kota Sejahtera wajib menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan APBD, bukan berbasis kas!

Jawaban dari **Khoirun Nisa 2313031005**

Sektor publik, seperti pemerintah, mengelola uang negara yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Sistem akuntansi berbasis akrual lebih tepat digunakan karena:

- Mencatat transaksi bukan hanya saat uang keluar/masuk, tapi juga saat hak dan kewajiban timbul.
- Memberikan gambaran keuangan yang lebih lengkap, misalnya utang, piutang, dan aset daerah.

- Membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, tidak hanya berdasarkan kas yang tersedia. Kalau hanya berbasis kas, laporan bisa menyesatkan karena hanya terlihat uang yang masuk/keluar, tetapi kewajiban yang belum dibayar atau aset yang dimiliki tidak terlihat jelas.
2. Dilihat dari faktor lingkungan dan karakteristik sektor publik, apa saja hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Sejahtera dalam penerapan aplikasi e-budgeting? Berikan contoh nyata dari cerita di atas?

Jawaban dari **Catur Febrian 2313031018**

- Kapasitas SDM: Banyak pegawai OPD masih terbiasa dengan logika, cash basis sehingga kesulitan mencatat transaksi dengan sistem akrual. Ini menunjukkan adanya keterbatasan kompetensi teknis.
- Resistensi internal: Sebagian pejabat merasa aplikasi ini membatasi ruang mereka untuk “mengatur” anggaran demi kepentingan pribadi. Hal ini merupakan hambatan budaya organisasi dan moral hazard.
- Partisipasi masyarakat rendah: Tidak semua warga melek digital, sehingga fitur transparansi tidak dimanfaatkan secara luas. Faktor lingkungan sosial seperti literasi teknologi dan akses internet menjadi kendala nyata.

Contoh dari cerita: Pegawai salah mencatat transaksi karena masih pakai logika kas (SDM lemah).

Notulensi Post Test Kelompok 1, yang mengerjakan quiziz 22 orang 2 orang alfa atas nama Aulya Syifa Zulkarnaen 2313031009 dan Desmala Az-zahra 2313031002

